

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Sanen selaku Kepala Desa Sumpinghayu, Kecamatan Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap, mendapatkan dan mempertahankan kekuasaannya dengan memanfaatkan berbagai bentuk modal yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu sehingga membentuk dinasti politik, yakni modal sosial, ekonomi, budaya, dan simbolik. Modal sosial digunakan oleh Sanen dalam memperkuat jaringan relasi yang luas dengan berbagai kelompok seperti tokoh masyarakat dan masyarakat dan elite di luar Sumpinghayu yang lebih kuat. Modal ekonomi oleh Sanen digunakan dengan membentuk ketergantungan terhadap ekonomi atas keluarga Sanen dan membentuk pola ekonomi yang dikuasai oleh keluarga Sanen. Modal budaya digunakan oleh Sanen dalam memperkuat citra pemimpin yang mempertahankan tradisi, nilai dan norma yang ada di Sumpinghayu, serta modal simbolik yang digunakan untuk memperkuat pengakuan yang dimilikinya untuk terus bertahan dalam ranah dinasti politik.

Sedangkan dalam mempertahankan kekuasaan, Sanen melakukan berbagai upaya melalui beberapa tindakan yang didasarkan kepada dimensi dan legalitas kekuasaan itu sendiri yang mana hal ini mencerminkan pemikiran dari Haryanto. Praktik intimidasi dan cara tidak bermoral lainnya digunakan dalam mempertahankan dinasti politik keluarga Sanen.

Pada akhirnya, kombinasi dari penggunaan modal Bourdie, strategi mempertahankan kekuasaan dan adanya struktural sosial elite, hal tersebut mengakibatkan terbentuknya dinasti politik, di mana kekuasaan diwariskan atau dipertahankan dalam lingkup keluarga kepala desa Sanen. Dinasti politik ini telah berlangsung selama hampir dua dekade dan memperkuat posisi kekuasaan Sanen dalam pemerintahan di Sumpinghayu sebagai elite yang paling berkuasa.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk berbagai pihak guna menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang lebih demokratis dan transparan serta untuk peneliti selanjutnya berkaitan dengan penggunaan modal yang membentuk dinasti politik sebagai berikut:

1. Pertama, bagi pemerintah desa, transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan harus menjadi prioritas utama. Kepala desa dan perangkatnya perlu memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. Selain itu, sistem demokrasi di tingkat desa perlu diperkuat dengan memastikan bahwa proses pemilihan kepala desa berjalan secara adil dan terbuka, sehingga tidak ada dominasi dari satu keluarga atau kelompok politik tertentu.
2. Kedua, bagi masyarakat, partisipasi aktif dalam proses politik desa sangat diperlukan agar tidak hanya dikuasai oleh elite lokal. Kesadaran kritis

masyarakat terhadap praktik dinasti politik kepala desa juga perlu ditingkatkan, terutama dalam hal penggunaan modal dan cara dalam mempertahankan kekuasaan. Dengan keterlibatan yang lebih aktif, masyarakat dapat berperan sebagai pengawas jalannya pemerintahan desa dan memastikan bahwa kepemimpinan yang terbentuk benar-benar membawa manfaat bagi seluruh warga.

3. Ketiga, bagi peneliti selanjutnya, kajian mengenai dinasti politik di tingkat desa masih sangat relevan untuk dikembangkan lebih lanjut. Penelitian serupa dapat dilakukan di desa lain guna memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang pola dan dampak dari dinasti politik yang masih jadi permasalahan hingga hari dalam demokrasi di desa. Penelitian ini juga masih memiliki kekurangan dalam kajian penelitian yang terlalu meluas dan mencakup banyak hal, harusnya berfokus pada salah satu aspek kajian misalnya dalam ranah ekonomi, sosial, budaya atau simbolik harus di pilih salah satu, hal tersebut dilakukan guna memperoleh data yang lebih komprehensif dan mendapatkan hasil yang maksimal berkaitan dengan dinasti politik dari salah satu aspek.